

## **Bab I**

### **Pendahuluan**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah kegiatan akademik yang bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh mahasiswa selama kuliah. Melalui PKL, mahasiswa tidak hanya menerapkan teori dari kelas tetapi juga menghadapi tantangan praktis di dunia kerja, mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari ke dalam lingkungan kerja yang sebenarnya, serta memperoleh kesempatan untuk mengembangkan cara berpikir, menambah ide-ide berguna, dan meningkatkan pengetahuan mereka. PKL memberikan pengalaman langsung di lingkungan kerja profesional, memperdalam pemahaman mereka, dan mengasah keterampilan teknis dan interpersonal, seperti kemampuan berkomunikasi dan bekerja dalam tim. Selain itu, mengingat pentingnya menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas, banyak perguruan tinggi berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara meningkatkan mutu pendidikan dan menyediakan sarana-sarana pendukung agar menghasilkan lulusan yang baik dan andal, siap memasuki dunia kerja setelah lulus.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) adalah salah satu unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. DJPb memiliki peran penting dalam pengelolaan perbendaharaan negara. Tugas utama DJPb meliputi pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara, penyusunan dan pelaksanaan anggaran negara, pengelolaan kas negara, termasuk pengaturan likuiditas dan penarikan pinjaman, serta melakukan verifikasi dan pembayaran tagihan yang diajukan oleh satuan kerja. DJPb juga bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan fiskal dan keuangan yang ditetapkan oleh pemerintah, serta memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menyusun laporan keuangan pemerintah pusat.

Selain itu struktur organisasi pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga memiliki beberapa sub direktorat eselon diantaranya yaitu Direktorat Sistem Manajemen Investasi. Dalam bidang manajemen investasi pemerintah, Ditjen

Perbendaharaan terus berupaya untuk mempertajam fungsi regulator, salah satunya melalui review atau perbaikan regulasi dan perjanjian yang telah ada serta penyusunan regulasi dan perjanjian baru untuk mendukung terwujudnya tata kelola investasi pemerintah yang baik (good governance). Sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012, Ditjen Perbendaharaan telah menyalurkan dana APBN kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP) selaku operator pelaksanaan investasi pemerintah. Penyaluran dana APBN tersebut sebagai modal untuk investasi pemerintah dengan total dana investasi (reguler) yang disalurkan dari APBN ke PIP sebesar Rp7.727,1 miliar dengan rincian sebagai berikut: tahun 2006 sebesar Rp2.000,0 miliar, tahun 2007 sebesar Rp2.000,0 miliar, tahun 2009 sebesar Rp500,0 miliar, tahun 2010 sebesar Rp927,5 miliar, tahun 2011 sebesar Rp1.000,0 miliar, dan tahun 2012 sebesar Rp1.299,6 miliar. Selain dana investasi pemerintah (reguler) tersebut, terdapat dana investasi pemerintah berupa penugasan (mandatory) yang dialokasikan dalam APBN, yaitu Pinjaman dengan Persyaratan Lunak kepada PT PLN, Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, Dana Geothermal, dan Dana Investasi Pemerintah untuk Pengambilalihan PT Inalum.

Direktorat Sistem Manajemen Investasi (SMI) mengelola dana yang bersumber dari penerusan pinjaman, pengelolaan kredit program dan kredit investasi pemerintah. Pengelolaan dana penerusan pinjaman dilakukan melalui Subsidiary Loan Agreement (SLA), Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD). Pengelolaan dana penerusan pinjaman ini antara lain adalah melaksanakan perhitungan, penagihan, dan rekonsiliasi kewajiban pembayaran dari debitur kepada pemerintah. Saat ini proses perhitungan, penagihan, dan rekonsiliasi serta proses pelayanan data lainnya berada pada masa transisi dengan menggunakan aplikasi Debt Management and Financial Analysis System (DMFAS) yang telah dipergunakan sebelumnya dalam penatausahaan Loan Agreement (LA).

Proses atau mekanisme pelaksanaan investasi pemerintah dimulai dengan PIP yang menyampaikan RKI kepada DJPBN cq Dit. SMI sebagai bahan penyusunan DIPA. Dit. SMI kemudian membuat RKA kepada DJA untuk diterbitkan SAP SK dan selanjutnya ke Dirjen Perbendaharaan untuk dilakukan

pengesahan DIPA. PIP mengajukan permohonan pencairan kegiatan investasi melalui Dit. SMI selaku KPA. Dit. SMI menerbitkan SPM untuk diajukan ke KPPN Jakarta II, dan KPPN Jakarta II selanjutnya menerbitkan SP2D Investasi Pemerintah dan melaksanakan pembayaran ke PIP (RIDI). Langkah ini dilaksanakan apabila komitmen PIP sudah disetujui oleh KIPP. Selanjutnya, BUMN/BUMD/BLU/Pemda/BLUD/Swasta/Asing menyerahkan proposal investasi kepada PIP yang kemudian melakukan analisa kelayakan dan risiko investasi sesuai amanat PP1/2008 dan PMK 181/2008. Apabila proposal diterima, dapat diteruskan oleh PIP ke rapat KIPP untuk diperoleh rekomendasi keputusan final diterima atau ditolaknya proposal investasi; jika ditolak, proposal dikembalikan kepada pihak yang mengajukan. Berdasarkan rekomendasi KIPP, PIP melakukan kerjasama investasi dengan pihak terkait, dan setelah semua transaksi dan kegiatan investasi dilaksanakan, PIP menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan investasi kepada Dit. SMI.

Dalam hal penerusan pinjaman, alur proses SLA serta pinjaman bersumber RDI/RPD dilakukan setelah penandatanganan SLA atau perjanjian pinjaman. Keputusan cara penyelesaian piutang negara dilaksanakan melalui Komite Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari NPPP dan PP RDI pada BUMN/PT yang terdiri dari unit-unit pada Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. Sebagai langkah penyesuaian dalam menghadapi perkembangan bisnis BUMN dalam menata kembali kinerja keuangannya, di akhir tahun 2012 dilakukan upaya relaksasi ketentuan dalam program penyelesaian piutang negara yang bersumber dari perjanjian penerusan pinjaman dan perjanjian pinjaman RDI. Mekanisme penyelesaian piutang negara melalui penjadwalan kembali (rescheduling) memberikan ruang yang lebih leluasa bagi BUMN dalam memenuhi pembayaran kembali kepada pemerintah. Revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.05/2007 diharapkan dapat memberikan kondisi yang lebih kondusif dalam penyelesaian piutang negara.

Dalam pola subsidi bunga, kredit program pola subsidi bunga meliputi Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP), Kredit Pemberdayaan Pengusaha

NAD dan Nias (KPP NAD-Nias) untuk korban bencana alam gempa dan tsunami, Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), dan Kredit Skema Subsidi Resi Gudang (S-SRG). Salah satu usaha pemerintah dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional yang sejalan dengan arah kebijakan fiskal yang mencakup pro poor, pro growth, pro job dan pro environment diwujudkan dengan pemberdayaan sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM-K). Dalam mendukung program tersebut, pemerintah berusaha meningkatkan akses permodalan UMKM-K dari sektor perbankan. Beberapa bentuk dukungan pemerintah antara lain penyediaan dana kredit bagi perbankan untuk disalurkan kembali kepada UMKM-K, penyediaan subsidi bunga kredit program, dan penjaminan Kredit Usaha Rakyat.

Sejak tahun 2003, pemerintah berkomitmen untuk menyediakan pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) yang disalurkan melalui perbankan dan BUMN lembaga keuangan non bank. Melalui skema ini, pemerintah meminjamkan sejumlah dana kepada perbankan dan BUMN lembaga keuangan non bank untuk disalurkan kembali kepada calon debitur UMKM-K dalam bentuk Kredit Modal Kerja atau Kredit Investasi. KUMK bersifat revolving, dimana kredit yang telah dibayarkan kembali oleh debitur selanjutnya dapat dipinjamkan kembali oleh Bank Pelaksana kepada UMK lainnya. Program KUMK akan disalurkan hingga tahun 2019 dengan outstanding pinjaman KUMK dari pemerintah kepada 22 instansi perbankan dan BUMN lembaga keuangan non bank per 31 Desember 2012 mencapai Rp2,72 triliun. Pada 31 Desember 2010, jumlah outstanding pinjaman KUMK adalah Rp2,38 triliun, pada 31 Desember 2011 sebesar Rp2,92 triliun, dan pada 31 Desember 2012 sebesar Rp2,72 triliun. Jumlah kumulatif penyaluran KUMK sejak diluncurkan pada tahun 2003 hingga 31 Desember 2012 mencapai Rp37,19 triliun.

Untuk membantu sektor UMKMK termasuk petani, peternak, pekebun, dan nelayan yang usahanya kurang feasible namun bankable, pemerintah telah meluncurkan kredit program skema subsidi bunga bekerjasama dengan perbankan nasional. Kredit program skema subsidi bunga dilakukan dengan cara pemerintah menanggung selisih tingkat bunga komersial yang berlaku untuk kegiatan usaha

sejenis dan tingkat bunga yang menjadi beban UMKM-K. Realisasi pembayaran subsidi bunga kredit program pemerintah menunjukkan peningkatan pada tahun 2012 sebagai akibat dari meningkatnya penyaluran dari bank-bank pelaksana. Pada APBN 2011, alokasi subsidi bunga adalah sebesar Rp484 miliar dengan realisasi pembayaran subsidi bunga sebesar Rp287 miliar (59%), sementara pada APBN 2012 alokasi subsidi bunga adalah sebesar Rp372 miliar dengan realisasi pembayaran subsidi bunga sebesar Rp309 miliar (89%).

Selain kredit program skema subsidi bunga, pemerintah meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan skema penjaminan sejak tahun 2009. KUR ditujukan untuk calon debitur yang usahanya feasible namun tidak mampu menyediakan agunan tambahan kepada perbankan (not bankable). Dengan adanya KUR diharapkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang baru memulai usaha dan terkendala dengan agunan kredit akan tetap dapat mengakses pembiayaan kredit dari perbankan. Target penyaluran KUR selama 5 tahun (2009 hingga 2014) adalah sebesar Rp100 triliun atau Rp20 triliun per tahun. Namun demikian, realisasi penyaluran KUR sampai dengan 31 Desember 2012 atau selama periode 3 tahun telah mencapai Rp97 triliun. Terhadap penyaluran KUR yang dilakukan perbankan tersebut, pemerintah membayar imbal jasa penjaminan kepada perusahaan penjamin sebesar 3,25% per tahun untuk menjamin risiko KUR sebesar maksimal 80% dari plafon kredit. Sebagai dampak peningkatan penyaluran KUR, pemerintah telah meningkatkan alokasi anggaran subsidi imbal jasa penjaminan pada APBN, dengan alokasi imbal jasa penjaminan pada APBN 2011 sebesar Rp636 miliar dan realisasi pembayaran imbal jasa penjaminan sebesar Rp624 miliar (98%), sedangkan pada APBN 2012 alokasi imbal jasa penjaminan adalah sebesar Rp801 miliar dengan realisasi pembayaran imbal jasa penjaminan sebesar Rp801 miliar (100%).

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Investasi adalah unit vertikal di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Kementerian Keuangan, yang memiliki tugas utama dalam pengelolaan dan penyaluran dana investasi pemerintah, termasuk investasi yang dilakukan melalui Surat Berharga Negara (SBN) dan instrumen keuangan lainnya. Secara umum,

KPPN Khusus Investasi bertanggung jawab dalam beberapa aspek penting, seperti penyaluran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke berbagai program dan proyek investasi yang dilakukan oleh pemerintah, serta penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja terkait dengan penyaluran dana investasi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik. Selain itu, KPPN Khusus Investasi mengelola administrasi dan sistem informasi yang mendukung proses penyaluran dan pelaporan dana investasi, termasuk penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi data. Unit ini juga melakukan pengawasan dan pengendalian internal untuk memastikan bahwa dana investasi digunakan sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, KPPN Khusus Investasi memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan fiskal pemerintah melalui pengelolaan investasi yang efektif dan efisien, sehingga berkontribusi pada stabilitas keuangan negara dan pembangunan ekonomi nasional.

Dashboard KPPN KI adalah aplikasi yang terdiri dari beberapa modul, yaitu modul rekonsiliasi, modul tagihan, modul bukti bayar, dan modul siDebit. Modul rekonsiliasi adalah sebuah sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk menyelaraskan dan memverifikasi data keuangan dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi dan akurasi. Modul ini berfungsi untuk membandingkan data transaksi dari berbagai sistem atau catatan. Modul tagihan adalah sebuah sistem atau komponen perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola proses penagihan. Modul ini berfungsi untuk membuat, mengirim, melacak, dan mengelola tagihan kepada debitur. Modul bukti bayar adalah bagian dari sistem keuangan atau perangkat lunak manajemen yang dirancang untuk mencatat, menyimpan, dan mengelola bukti pembayaran yang dilakukan oleh debitur. Modul ini membantu dalam memastikan bahwa semua transaksi pembayaran terdokumentasi dengan baik, memudahkan proses verifikasi, dan meningkatkan transparansi serta akurasi keuangan. Modul siDebit adalah komponen dalam sistem keuangan yang berfokus pada pengelolaan dan pemantauan kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi oleh debitur.

Sebelumnya, dashboard KPPN KI telah dirancang oleh tim KPPN KI, namun dalam pengujian kriteria aplikasi oleh Dit. SITP, beberapa aspek tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Karena hal ini, perlu dilakukan perubahan signifikan baik dari segi struktur kode maupun tampilan aplikasi agar dapat memenuhi standar pembangunan aplikasi yang ditetapkan oleh Dit. SITP. Proses perubahan ini diperlukan untuk memastikan bahwa aplikasi dapat memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam hal fungsionalitas, keamanan, dan keandalan. Perubahan yang dilakukan melibatkan penyesuaian yang mendalam terhadap kode program serta peningkatan pada antarmuka pengguna agar dapat memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh Dit. SITP. Tujuan dari perubahan ini bukan hanya untuk memastikan aplikasi dapat lolos pengujian, tetapi juga untuk meningkatkan performa keseluruhan dashboard KPPN KI.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Dit. SITP memberikan solusi dengan melakukan reengineering terhadap dashboard KPPN KI menggunakan template standar pengembangan aplikasi yang telah ditetapkan oleh Dit. SITP. Pembaruan pada sisi frontend dilakukan dengan menerapkan bahasa pemrograman Vue.js, sementara untuk backend menggunakan Node.js. Langkah reengineering ini diperlukan untuk memastikan bahwa dashboard KPPN KI dapat memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh Dit. SITP, termasuk dalam hal fungsionalitas, keamanan, dan performa aplikasi. Perubahan pada tatanan frontend dan backend akan memungkinkan integrasi yang lebih baik, peningkatan dalam manajemen data, serta responsivitas yang lebih baik terhadap permintaan pengguna. Proses reengineering ini bertujuan untuk meningkatkan keandalan serta efisiensi aplikasi dashboard KPPN KI secara keseluruhan. Dengan menerapkan teknologi Vue.js dan Node.js, diharapkan aplikasi dapat memiliki performa yang optimal dan mampu menangani beban kerja yang lebih besar dengan lebih efisien.

Mengacu dengan pembahasan di atas, Direktorat Jenderal Perbendaharaan berupaya terus untuk berinovasi dengan mengembangkan Inovasi Digital Treasury menuju pengelolaan anggaran terbaik dengan mengembangkan microservices Digit yang di dalamnya juga terdapat Role U-Fine yang dikelola Direktorat Sistem Manajemen Investasi dan Dashboard KPPN Khusus Investasi yang mempunyai beberapa tugas diantaranya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor 262/PMK.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Khusus Investasi memiliki peran yang sangat penting dalam manajemen investasi pemerintah. KPPN Khusus Investasi bertanggung jawab langsung kepada Direktur Sistem Manajemen Investasi dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Fungsi utama meliputi penatausahaan naskah perjanjian dan DIPA investasi pemerintah, penerusan pinjaman, kredit program, dan investasi lainnya. Selain itu, KPPN Khusus Investasi juga bertugas dalam menyusun proyeksi penyaluran investasi pemerintah, melakukan pengujian dan verifikasi permintaan penyaluran dana dari debitur atau bank pelaksana, serta menyusun permintaan pembayaran terkait investasi, penerusan pinjaman, kredit program, dan investasi lainnya. Fungsi lainnya mencakup penerbitan SPM investasi dan daftar penyaluran investasi, penatausahaan realisasi penarikan investasi, perhitungan kewajiban, penatausahaan, dan rekonsiliasi pembayaran dari debitur kepada pemerintah, serta analisis laporan keuangan terkait investasi. KPPN Khusus Investasi juga terlibat dalam pengelolaan database sistem manajemen hutang dan analisis keuangan (DMFAS), pelaksanaan kehumasan dan keterbukaan informasi publik, serta administrasi internal terkait manajemen organisasi, keuangan, SDM, dan tata usaha. Selain itu, KPPN Khusus Investasi juga memiliki tanggung jawab dalam penyusunan bahan masukan untuk perencanaan strategis dan laporan evaluasi kinerja.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam laporan ini sesuai dengan judul laporan di atas mengenai Full-Stack Developer adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara menyusun SRS (software requirement specification)?
2. Bagaimana cara membuat struktur API menggunakan Node.js?
3. Bagaimana Implementasi Front-End dalam mengembangkan aplikasi Dashboard KPPN KI?
4. Bagaimana cara mengembangkan aplikasi dengan Role-Based Access Control (RBAC)?



5. Apa keunggulan menggunakan arsitektur Microservices dalam beberapa role model aplikasi yang berbeda?

### **1.3 Tujuan Praktek Kerja Lapangan**

Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan pada PT Bukit Teknologi Digital yaitu :

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

1. **Mengaplikasikan Teori ke Praktik:** Memberikan kesempatan bagi peserta untuk menerapkan pengetahuan dan teori yang dipelajari di ruang kelas ke situasi dunia nyata dalam lingkungan kerja.
2. **Meningkatkan Keterampilan Teknis dan Profesional:** Mengembangkan keterampilan teknis dan profesional yang relevan dengan bidang studi mereka. Ini termasuk kemampuan teknis, komunikasi, manajemen waktu, dan keterampilan kerja tim.
3. **Mengenal Dunia Kerja:** Memberikan pemahaman tentang dinamika dan budaya kerja di industri atau sektor tertentu. Hal ini membantu peserta memahami ekspektasi dan standar profesional yang berlaku.
4. **Mengembangkan Jaringan Profesional:** Memberikan kesempatan untuk membangun jaringan dengan profesional di bidang mereka. Jaringan ini dapat berguna untuk kesempatan kerja di masa depan dan pengembangan karir.
5. **Mengidentifikasi Kekuatan dan Kelemahan Diri:** Membantu peserta memahami kekuatan dan kelemahan mereka dalam konteks profesional, sehingga mereka dapat bekerja pada area yang perlu pengembangan.
6. **Mengembangkan Etos Kerja dan Sikap Profesional:** Mendorong pengembangan etos kerja yang baik, seperti disiplin, tanggung jawab, integritas, dan sikap profesional lainnya yang penting dalam dunia kerja.

7. **Meningkatkan Peluang Kerja:** Pengalaman praktis yang didapat selama PKL dapat meningkatkan daya saing peserta di pasar kerja, memberikan mereka keunggulan dibandingkan kandidat lain yang mungkin tidak memiliki pengalaman praktis.
8. **Mengidentifikasi Minat Karir:** Membantu peserta mengeksplorasi minat dan preferensi karir mereka, serta membuat keputusan yang lebih baik tentang jalur karir yang ingin mereka ambil di masa depan.
9. **Mendapatkan Pengalaman Kerja Nyata:** Memberikan pengalaman kerja nyata yang dapat dimasukkan dalam resume, sehingga memberikan nilai tambah saat melamar pekerjaan setelah lulus.
10. **Kolaborasi antara Institusi Pendidikan dan Industri:**  
Meningkatkan kolaborasi antara institusi pendidikan dan industri, memastikan bahwa kurikulum yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan dan tren di dunia kerja.
11. **Praktek Kerja Lapangan (PKL)** berperan sebagai jembatan antara pengetahuan teoritis dan penerapannya secara praktis, memungkinkan mahasiswa untuk menerapkan teori yang telah dipelajari menjadi hasil yang nyata. Melalui keterlibatan dalam PKL, mahasiswa mendapatkan kesempatan unik untuk mengamati, mengalami, dan menerapkan prinsip-prinsip yang telah mereka pelajari selama kuliah. Kegiatan ini mendorong pengembangan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang komprehensif, yang sangat penting bagi profesi yang mereka pilih. Dengan demikian, PKL tidak hanya memperkaya pengalaman akademik, tetapi juga mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan di dunia kerja dengan lebih percaya diri dan kompeten.
12. **Praktek Kerja Lapangan (PKL)** memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengeksplorasi dan memahami lingkungan kerja, budaya perusahaan, serta berbagai peran dan tanggung jawab yang ada di dalamnya. Pengalaman ini membantu mahasiswa

dalam menentukan arah karir yang paling sesuai dengan minat dan keahlian mereka, serta memberikan gambaran nyata tentang profesi yang ingin mereka tekuni di masa depan.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan spesifik dari Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini adalah untuk mengembangkan aplikasi Dashboard KPPN Khusus Investasi dan aplikasi U-Fine (UMKM Financing Empowerment) yang nantinya akan di deploy melalui arsitektur Microservices Digit. Pengembangan aplikasi kali ini yaitu menggunakan framework Vue.js dan dua library yang berbeda, yaitu (Prime Vue dan Xtable) sedangkan untuk di sisi server, framework yang digunakan adalah Node.js. Penerapan framework dari JavaScript digunakan karena skalabilitas yang bisa memuat beberapa framework dan library yang banyak untuk memperluas fungsionalitas aplikasi.

### **1.4 Manfaat Praktek Kerja Lapangan**

Berikut ini adalah manfaat dari praktek kerja lapangan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Memperoleh pengalaman langsung yang bisa diimplementasikan langsung untuk kebutuhan masyarakat.
2. Memperoleh relasi baru yang hebat guna menambah wawasan pengetahuan sesuai dengan bidang yang saya tekuni yaitu sebagai software developer.
3. Mengembangkan keterampilan dalam menganalisis alur kerja sistem dan proses bisnis yang diimplementasikan dalam aplikasi yang dikerjakan.
4. Menambah portfolio kerja yang sangat berguna di kemudian hari sebagai acuan perusahaan atau instansi ketika membuka lapangan pekerjaan baru.
5. Memberikan wawasan tentang dinamika dan budaya kerja di instansi, termasuk bagaimana tim bekerja, cara mengatasi konflik, dan bagaimana memanajemen waktu dan proyek.
6. Mampu lebih sistematis dalam mengembangkan proyek yang berskala besar seperti Kementrian Keuangan Republik Indonesia.